CASCADING DINAS PMPTSP TAHUN 2023

SASARAN DAERAH

Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal
Indikator : Pertumbuhan Nilai Realisasi Penanaman Modal

ESELON II — **TUJUAN PERANGKAT DAERAH**

Meningkatkan Realisasi PMA dan PMDN
Indikator : Pertumbuhan Nilai Realisasi PMA dan PMDN

ESELON II — **SASARAN PERANGKAT DAERAH**

Sasaran 1
Meningkatnya Realisasi PMA dan PMDN
Indikator : Persentase Peningkatan PMA dan PMDN
Target : 3 %

Sasaran 2
Meningkatkan Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan Perijinan
Indikator : Nilai SKM
Target : 84

ESELON III

Program Pengembangan Iklim penanaman Modal
Indikator : Persentase Peningkatan jumlah investor

Program Promosi penanaman Modal
Indikator : Persentase terlaksananya Promosi Penanaman Modal

Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
Indikator : Persentase pelaku usaha yang memberikan pelaporan dan kegiatan tepat waktu

Program pelayanan Penanaman Modal
Indikator: Persentase terselenggaranya Pelayanan Perizinan dan non Perizinan Penanaman Modal

Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
Indikator : Persentase realisasi perijinan

Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif di Bidang penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
Indikator : Persentase kegiatan pemberian Fasilitas/ insentif di Bidang Penanaman Modal

Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
Indikator : Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal

SUB KOORDINATOR PENGEMBANGAN PM

Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota
Indikator : Persentase terlaksananya kegiatan kajian peta Potensi Investasi

Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota
Indikator: Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten /Kota

SUB KOORDINATOR PENGEMBANGAN PM

Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
Indikator : Jumlah Nilai Investasi

Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal
Indikator : Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/ Kota

Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota
Indikator : Jumlah Dokumen HasilKegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/ Kota

SUB KOORDINATOR PENGEMBANGAN PM

Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
Indikator : Persentase terselenggaranya Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal
Indikator: Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan

Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanamanm Modal
Indikator: Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal

Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal
Indikator: Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan

SUB KOORDINATOR PENGENDALIAN PM

Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
Indikator : Persentase Perijinan yang disetujui

Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
Indikator: Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan PelayananTerpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal
Indikator: Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal

Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan
Indikator: Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan

SUB KOORDINATOR PERIJIJNAN

Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang terintegrasi pada tingkat Daerah Kabupaten/KotaKabupaten/Kota
Indikator : Persentase Tersusunya Data/ Informasi Pelayanan Perijinan

Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
Indikator: Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan

SUB KOORDINATOR PELAYANAN